

PKn

Semester 1

Perumusan Pancasila

A. Nilai Juang dalam Perumusan Pancasila

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian negara lain. Memang Jepang pernah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Perdana Menteri Kuniaki Koiso yang menggantikan Perdana Menteri Tojo berpidato pada 17 Juli 1944 yang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi Hindia Timur. Para tokoh terdahulu bangsa Indonesia, semakin terpancang untuk berjuang dan membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah sebuah hadiah dari bangsa penjajah.

Pada 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang dan 7 orang di antaranya merupakan bangsa Jepang, yang tidak memiliki hak suara. Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut *Dokuritsu Junbi Cosakai*. BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat dan wakilnya R. Soeroso beserta seorang yang berkebangsaan Jepang.

Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta (sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi). Hari itu bertepatan dengan bulan Ramadhan (bulan puasa pada kalender umat Islam).

Pengibaran bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati (istri Soekarno) dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan WR. Soepratman, Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak.

Pancasila lahir tidak semudah yang dibayangkan. Kelahirannya memerlukan proses yang sangat lama. Dimulai dari perjuangan rakyat Indonesia yang bersatu dalam melawan penjajah sampai akhirnya tercetuslah istilah Pancasila yang menjadi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit yaitu sekitar abad ke-14 yang terdapat dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma. Kitab Negarakertagama merupakan karya dari Mpu Prapanca, sedangkan kitab Sutasoma merupakan karya Mpu Tantular.

1. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari, dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulan, di antaranya Mr. Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Ketiga tokoh tersebut sama-sama membicarakan tentang dasar negara.

Dalam perumusan dasar negara terdapat tiga tokoh yang masing-masing mengajukan lima dasar negara. Untuk lebih jelasnya mari bandingkan pendapat dari ketiga tokoh tersebut.

a. Mr. Mohammad Yamin

Saat sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 beliau menyampaikan lima dasar negara, yaitu:

1. peri kebangsaan;
2. peri kemanusiaan;
3. peri ketuhanan;
4. peri kerakyatan;
5. kesejahteraan rakyat

b. Prof. Dr. Soepomo

Pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial

c. Ir. Soekarno

Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Kelima rancangan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada akhir sidang, tidak ada keputusan tentang rumusan dasar negara yang mana yang dapat diterima. Kemudian, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk membahas usulan-usulan tersebut. Akhirnya, pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta.

Rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia Sembilan dinyatakan juga sebagai rumusan BPUPKI. Rumusan Pancasila pada 22 Juni 1945 (Rumusan Piagam Jakarta) adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sidang BPUPKI Kedua

Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak 1 Juni yang lalu. Menurut laporan itu, pada 22 Juni 1945 Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik.

Tokoh yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota, yaitu anggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota Cuo Sangi In dari luar Jakarta, dan pada waktu itu Jakarta menjadi tempat rapat Cuo Sangi In. Dari sidang ini dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang sehingga dikenal dengan nama

Panitia Sembilan. Panitia ini diketuai oleh Ir Soekarno.

Kesembilan orang tersebut, yaitu:

- a. Ir. Soekarno,
- b. Drs. Mohammad Hatta,
- c. Mohamad Yamin,
- d. Ahmad Subarjo,
- e. A.A. Maramis,
- f. H. Agus Salim,
- g. Abikusno Tjokrosujoso,
- h. K.H. Abdul Kahar Muzakir, dan
- i. K.H. Wachid Hasim.

3. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Jepang membubarkan BPUPKI pada 7 Agustus 1945 sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kemudian, untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Linkai) sebagai penggantinya. Pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama.

Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan panitia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut.

- a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang telah disusun oleh panitia perumus pada 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan.

- b. Menetapkan dan mengesahkan UUD yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD pada 16 Juli 1945.
- c. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia.
- d. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dalam sidang pertamanya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan undang-undang dasar negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945, terdiri atas dua bagian, yaitu "Pembukaan" yang di dalamnya memuat Pancasila dan "Batang Tubuh UUD."

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan oleh para tokoh kemerdekaan RI, antara lain sebagai berikut.

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki sikap untuk berani dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- c. Pendirian setiap bangsa di dunia memiliki harkat dan martabat yang sama
- d. Sikap rela berkorban, harta, jiwa, tenaga, dan pikiran demi kepentingan bersama
- e. Sikap bersedia musyawarah dan mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- f. Sikap sederhana dalam hidup, hemat, bekerja keras, dan pantang menyerah
- g. Sikap persatuan dan kesatuan bangsa meskipun di dalamnya terdapat perbedaan asal-usul, suku, ras, agama dan sebagainya
- h. Sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi.

B. Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila

Adanya kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila menunjukkan bahwa para tokoh pejuang sangat mempertimbangkan masa depan bangsa dan negaranya. Mereka banyak mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaga demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pejuang tersebut memiliki jiwa dan semangat perjuangan yang tinggi untuk merdeka. Jiwa dan semangat perjuangan yang dimiliki oleh pejuang itu, di antaranya sebagai berikut.

1. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.
2. Pro patria dan primus patrialis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antarumat beragama, suku, golongan, dan bangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
5. Jiwa ksatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

Pancasila tidak hanya sebagai jiwa bangsa Indonesia, juga sebagai Kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu upaya nyata seorang pelajar dalam menghormati semangat dan nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila adalah sebagai berikut :

1. belajar dengan rajin,
2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
3. saling menghormati perbedaan,
4. tidak semena-mena terhadap orang lain.

C. Meneladani Nilai-Nilai Perjuangan

Nilai-nilai luhur para pahlawan tentunya penting untuk diteladani dan dilakukan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memupuk dan mengembangkan nilai-nilai juang yang telah dicontohkan oleh para pejuang. Nilai juang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu nilai dasar dan nilai operasional.

1. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai nilai kebenaran yang ada dan perlu dilestarikan. Nilai-nilai dasar ini merupakan perwujudan tatanan nilai budaya luhur yang dijadikan pedoman hidup dan kekuatan moral spiritual bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
- b. Nilai-nilai Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu nasionalisme dan patriotisme.
- c. Nilai-nilai dalam UUD 1945, yaitu semangat kebangsaan dan kemerdekaan.

2. Nilai Operasional

Nilai operasional atau praksis adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya berbentuk norma hukum atau norma sosial.

Hal-hal yang termasuk dalam nilai-nilai operasional itu adalah sebagai berikut.

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jiwa dan semangat merdeka dan antipenjajahan
- c. Patriotisme
- d. Kepahlawanan
- e. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
- f. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
- g. Persatuan dan kesatuan
- h. bekerja tidak mengharapkan balasan
- i. Percaya kepada diri sendiri atau percaya kepadakekuatan dan kemampuan sendiri
- j. Pembangunan nasional
- k. Percaya kepada hari depan yang gemilang daribangsanya
- l. Idealisme kejuangan yang tinggi
- m. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air,bangsa dan negara
- n. Nasionalisme
- o. Kesetiakawanan dan senasib sepenanggungan dalamkebersamaan
- p. Disiplin yang tinggi
- q. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman,tantangan, hambatan, dan gangguan

Tidak hanya memiliki jiwa yang tangguh, para pejuang pun memiliki semangat yang menggebu-gebu dan patut diteladani oleh semua orang sebagai generasi penerus bangsa ini, di antaranya dengan menumbuhkan:

- a. semangat menentang dominasi asing, terutamapenjajahan;
- b. semangat dalam pengorbanan jiwa, raga maupun hartabenda;
- c. semangat tahan menderita dan tahan uji;
- d. semangat kepahlawanan;
- e. semangat persatuan dan kesatuan;
- f. percaya pada diri sendiri.

Sebagai siswa yang baik, tentunya dapat meneladani nilai-nilai luhur para pahlawan tersebut. Caranya, dapat diwujudkan dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Di antara sikap dan perilaku yang dapat dikembangkan tersebut misalnya:

1. Di Lingkungan Keluarga

Sikap keteladanan dan nilai-nilai luhur pahlawan di lingkungan keluarga dapat diterapkan melalui hal-hal berikut:

- a. mencintai dan menyayangi orangtua;
- b. menaati segala nasihatnya;
- c. mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas denganserius, ulet, dan rajin;
- d. disiplin terhadap waktu;
- e. berbuat sopan terhadap ayah, ibu, saudara dan anggotakeluarga lainnya di rumah;
- f. menjaga hubungan baik dengan tetangga;
- g. rajin belajar dan pantang menyerah untuk meraihprestasi yang diinginkan.

2. Di Lingkungan Sekolah

Berikut ini beberapa contoh sikap yang dapat dikembangkan di lingkungan sekolah untuk meneladani nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan bangsa, yaitu:

- a. menolong sesama teman yang membutuhkan tanpamembedakan;
- b. mencintai dan menyayangi sesama teman;
- c. menyayangi dan menghormati guru;
- d. penuh konsentrasi ketika mengikuti pelajaran yangdisampaikan oleh bapak atau ibu guru;
- e. mengerjakan tugas-tugas sekolah;
- f. tidak terbiasa untuk kesiangan;
- g. tekun dan giat belajar;
- h. penuh semangat tanpa putus asa dalam meraihprestasi;
- i. patuh dan taat terhadap peraturan sekolah.

3. Lingkungan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai keteladanan para pahlawan dapat diterapkan melalui cara-cara, yaitu:

- berperilaku sopan dan santun dengan penuh tata kramadi masyarakat;
- meningkatkan kedisiplinan dalam mengisikemerdekaan;
- berperan serta dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun(HUT) RI serta dapat mengambil maknanya;
- mencintai lagu-lagu daerah dan seni kebudayaanIndonesia;
- menghormati orang lain dengan penuh rasa tanggungjawab;
- menunjukkan rasa kecintaan yang tinggi terhadapmasyarakat, bangsa, dan negara;
- meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dankesatuan bangsa.

Latihan

- Rumusan Pancasila yang benar dan menjadi pedoman berbangsa dan bernegara terdapat pada
 - Pembukaan UUD NKRI 1945
 - Batang Tubuh UUD NKRI 1945
 - Seluruh pasal dalam UUD NKRI 1945
 - Tap MPR No. IV/MPR/2000
- Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah
 - mengutamakan kelompok
 - menumbuhkan semangat kebersamaan
 - berjuang dengan mengharapkan imbalan
 - membantu orang lain karena terpaksa
- Sikap saling menghormati antarsukubangsa merupakan kewajiban pergaulan terhadap sesama manusia, terutama karena kita
 - menerima sifat perbedaan
 - senasib sepenanggungan
 - sama-sama warga Negara
 - diwajibkan bersikap demikian
- Naskah Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia di ketik oleh
 - Wikana
 - Sajuti Melik
 - Adam Malik
 - Chairul Saleh
- Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan nama lain dari
 - PPKI
 - BPUPKI
 - KNIP
 - Dewan Revolusi Rakyat
- Pembacaan naskah Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di jalan
 - Imam Bonjol No. 1
 - Cikini Raya No. 15
 - Pegangsaan Timur No. 56
 - Kwitang Raya No. 16
- Selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air dikenal dengan istilah
 - Pro patrialis
 - Pro patri dan primus patrialis
 - Primus patri
 - Pro sosialis
- Nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah
 - penuh semangat tanpa putus asa dalam meraih prestasi
 - penuh konsentrasi ketika mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru
 - patuh dan taat pada aturan sekolah
 - berperilaku sopan dan santun dengan penuh tata krama di masyarakat
- Berikut adalah contoh yang termasuk kedalam nilai operasional, yaitu....
 - disiplin terhadap waktu
 - menjaga hubungan baik dengan tetangga
 - rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
 - menaati segala nasihatnya
- Presiden dan wakil presiden pertama dibentuk dengan cara
 - dipilih langsung oleh rakyat
 - mengangkat dirinya sendiri
 - direkomendasikan MPR
 - aklamasi suara bulat di PPKI
- Hasil kerja dari Panitia Sembilan adalah
 - UUD NKRI 1945
 - GBHN
 - Piagam Jakarta
 - KNIP
- Orang yang menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia Timur
 - Perdana Menteri Kuniaki Koiso
 - Perdana Menteri Tojo
 - Jenderal Terauci
 - Kapten Yamamoto

13. Orang yang menyampaikan rumusan lima dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 ialah
 - a. Mr. Mohammad Yamin
 - b. Prof. Dr. Supomo
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Drs. Moh. Hatta
14. Berikut adalah contoh nilai yang dikembangkan di lingkungan sekolah, yaitu
 - a. meningkatkan kedisiplinan dalam mengisi kemerdekaan
 - b. menunjukkan rasa kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara
 - c. meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. menolong sesama teman yang membutuhkan tanpa membedakan
15. Pencipta lagu ke bangsa Indonesia Raya, yaitu
 - a. Sajuti Melik
 - b. W.R Supratman
 - c. Soepomo
 - d. MR. Mohamad Yamin
16. Pada 17 Agustus 1945 naskah Proklamasi Kemerdekaan RI ditanda tangani atas nama bangsa Indonesia oleh
 - a. Soekarno dan Soepomo
 - b. Soekarno dan Soekarni
 - c. Soekarno dan Mohammad Hatta
 - d. Achmad Soebardjo dan Mohammad Hatta
17. Berikut orang yang merupakan golongan non-Islam dari sembilan tokoh BPUPKI, yaitu
 - a. Mohammad Yamin
 - b. AA. Maramis
 - c. Ahmad Subarjo
 - d. Abikusno Tjokrosujoso
18. Jumlah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 sebanyak
 - a. 9 orang
 - b. 21 orang
 - c. 27 orang
 - d. 30 orang
19. Berikut ini adalah nama-nama tokoh yang mengajukan lima dasar negara, kecuali
 - a. Prof. Dr. Supomo
 - b. Drs. Mohammad Hatta
 - c. Mr. Mohammad Yamin
 - d. Ir. Soekarno
20. Berikut hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan RI, yaitu
 - a. mengisinya dengan perilaku hurahura
 - b. berbuat sesuai zaman
 - c. senang bermalas-malasan
 - d. membuat prestasi yang baik untuk mengharumkan nama bangsa.

Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Pada 6 dan 9 Agustus dua kota di Jepang, yaitu ... dan ... dibom oleh Sekutu.
2. Sang Saka Merah Putih dijahit oleh ... yang merupakan isteri dari Ir. Soekarno.
3. Kitab Sutasoma merupakan karya dari
4. Dokuritsu Junbi Cosakai disebut juga sebagai
5. Dokuritsu Junbi Linkai disebut juga sebagai
6. BPUPKI diketuai oleh ... dan ... dengan wakilnya seorang bangsa Jepang.
7. KNIP merupakan kepanjangan dari
8. Piagam Jakarta disebut juga dengan
9. Salah satu isi Piagam Jakarta adalah
10. BPUPKI mengadakan sidang 2 (dua) kali, yaitu pada ... dan

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan?
2. Mengapa Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta menjadi tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
3. Apa yang dihasilkan dari sidang pertama PPKI?
4. Mengapa Indonesia perlu memiliki dasar Negara?
5. Dari manakah dasar negara Indonesia berasal?
6. Apakah orang perlu bermusyawarah? Kemukakan alasanmu.
7. Sikap dan perilaku apa yang sebaiknya dikembangkan di lingkungan sekolah?
8. Mengapa kita perlu meneladani nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan?
9. Apakah yang harus kita lakukan untuk menghargai perjuangan para pahlawan bangsa?
10. Menurutmu apakah perlu mengetahui proses perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan?

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

A. Proses Pemilihan Pilkada

Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Hal ini berarti rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan, negara. Misalnya dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

1. Pemilihan Umum

Peserta pemilu dapat bersifat lembaga atau perorangan. Peserta pemilu disebut perorangan jika yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Adapun kelembagaan adalah yang biasa dikenal dengan partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan pemilu dan kegiatan politik lainnya.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilu perlu diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

- Menyalurkan pendapat rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.
- Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena pengaruh dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri.
- Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.
- Pemilihan umum perlu diadakan teratur untuk menjamin terjadinya pergantian ke pemimpin negara, baik eksekutif maupun legislatif.

Asas Pemilu yang berlaku di Indonesia meliputi:

- langsung, artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung.
- umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti Pemilu.
- bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih calon sesuai dengan hati nuraninya.
- rahasia, artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.
- jujur dan adil (jurdil) artinya pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum ada empat, yaitu sebagai berikut.

- Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.
- Untuk memungkinkan terjadinya proses peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

Sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Sistem Mekanis dan Organik

Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu yang sama. Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organik, menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan rumah tangga, keluarga, fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).

Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Adapun menurut sistem organik, lembaga perwakilan rakyat mencerminkan perwakilan dari berbagai kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup masing-masing.

b. Sistem Distrik dan Proporsional

Sistem Distrik dan proporsional biasa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

1) Sistem Perwakilan Distrik/Mayoritas

Wilayah negara dibagi dalam distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih

2) Sistem Perwakilan Berimbang/Proporsional

Persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik.

Indonesia menggabungkan sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang (proporsional) untuk meminimalkan kelemahan dari kedua sistem tersebut. Penggabungan ini mewakili ciri-ciri dari setiap sistem tersebut sehingga dikenal istilah sistem semidistrik atau proporsional dengan daftar calon terbuka. Dengan sistem proporsional, kemungkinan terbuangnya sisa suara sebagai salah satu

kelemahan dari sistem distrik dapat dihindari. Adapun dengan sistem distrik, kemungkinan ketidaktahuan para pemilih terhadap kualitas calon wakil rakyat sebagai salah satu kelemahan dari system proporsional dapat dihindari. Digabungkannya kedua sistem tersebut dapat melahirkan kelebihan yang menutupi kelemahan dari masing-masing sistem Pemilu.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung. Tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih.
- Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (local democratic governance), semakin baik dan sejalandengan aspirasi serta kepentingan rakyat.
- Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Adapun persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004, di antaranya sebagai berikut.

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- Usia sekurang-kurangnya 30 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pesta demokrasi lokal yang disebut Pilkada memerlukan persiapan paling tidak 180 hari atau 6 bulan. Beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pilkada yaitu sebagai berikut.

- Masa persiapan yang meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- Tahap perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemilihan Sementara (KPPS), pemberitahuan dan pendaftaran pemantau KPUD.
- Tahap pengumuman yang dilakukan empat bulan sebelum pencoblosan, selain itu juga dilakukan pendaftaran calon, pemeriksaan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut calon yang dilakukan dengan undian.
- Lalu satu bulan sebelum hari pencoblosan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari. Dilanjutkan dengan masa tenang serta pencoblosan suara.
- Kemudian dilanjutkan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil Pilkada pada tingkat daerah penyelenggaraan Pilkada (KPUD).

B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan dikatakan bersifat presidensial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan.
- Kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
- Presiden tidak berhak membubarkan parlemen.
- Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan administratif tertinggi.

Dalam sistem presidensial, tidak dibedakan apakah presiden kepala negara atau kepala pemerintahan. Namun, yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden memiliki hak untuk mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu presiden, hak ini dikenal dengan sebutan hak prerogatif.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Sistem kepemimpinan terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah.

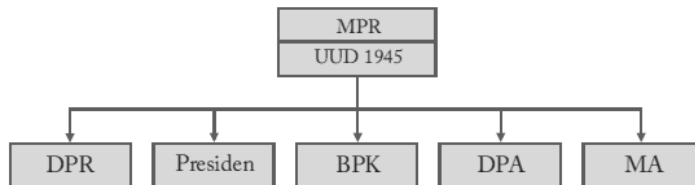
- b. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen.
- c. Parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah jika dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.

3. Sistem Pemerintahan Campuran

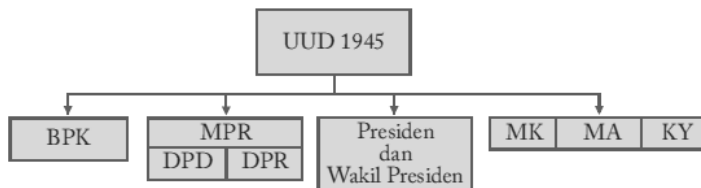
Sementara itu, dalam sistem campuran terdapat ciri-ciri presidensil dan parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat, tetapi juga ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri yang didukung oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer biasa.

Struktur lembaga negara yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah sebagai berikut.

**Susunan Lembaga Negara RI
Sebelum Amandemen UUD 1945**



**Susunan Lembaga Negara RI
Setelah Amandemen UUD 1945**



a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

Lembaga negara ini tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR, oleh karena itu saat ini ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari tata urutan dalam peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan ketika anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji jabatannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 2 ayat (3) bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Namun sebelum mengambil putusan dengan suara terbanyak terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saat ini MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN.

Menurut UUD 1945 Pasal 3 bahwa tugas-tugas MPR adalah sebagai berikut.

- 1) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
- 2) Melantik presiden dan wakil presiden.
- 3) Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Lembaga ini disebut parlemen karena kata parle berarti bicara. Artinya, mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat. Setelah menampung dan mempertimbangkan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, DPR dibentuk di pusat untuk mengawasi pemerintah pusat, dibentuk di daerah untuk mengawasi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Jadi lembaga eksekutif mempunyai peranan mengurus, sedangkan legislatif mempunyai fungsi mengatur. Dengan demikian, untuk membantu mengawasi pelaksanaan tugas kepala daerah, di daerah provinsi ataupun kabupaten/kota dibentuk lembaga legislatif tingkat daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian dalam rangka memperlancar tugasnya DPR mempunyai alat kelengkapan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pimpinan DPR

Pimpinan DPR terdiri atas ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih anggota DPR RI itu sendiri dengan cara pemilihan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR yang dibuat DPR sendiri. Setiap anggota DPR harus tergabung ke dalam salah satu fraksi yang dibentuk oleh DPR. Fraksi dibentuk untuk bertugas meningkatkan kemampuan yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR dan fraksi berbeda dengan komisi.

2) Komisi-Komisi

Komisi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri atas satu bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan sendiri oleh DPR dengan surat keputusan. Tugas komisi meliputi bidang perundang-undangan, anggaran, pengawasan. Untuk melaksanakan tugasnya komisi dapat melakukan dengar pendapat, rapat kerja, mengajukan pertanyaan dan kunjungan kerja atau jika perlu memanggil aparat pemerintah atau masyarakat umum, baik atas permintaan komisi maupun pihak lain.

3) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah bertugas menetapkan acara-acara DPR dalam satu tahun masa persidangan, memberikan pertimbangan kepada pimpinan, menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan DPR dan tugas lain yang diserahkan.

4) Badan Urusan Rumah Tangga

Pimpinan DPR bertugas memimpin rapat untuk menyimpulkan persoalan yang dibicarakan, menentukan kebijakan anggaran belanja, serta menyusun rencana kerja DPR, yaitu dengan membagikan pekerjaan antara ketua dan wakil ketua dengan mengumumkan secara terbuka dalam rapat paripurna.

Adapun keberadaan komisi yang ada di DPR, yaitu sebagai berikut.

No.	Komisi	Bidang yang dibahas
1.	I	Bidang luar negeri, pertahanan, dan informasi
2.	II	Pemerintahan, otonomi daerah, dan aparatur negara
3.	III	Bidang hukum dan keamanan
4.	IV	Bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan
5.	V	Bidang perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum
6.	VI	Bidang industri, perdagangan, investasi, dan BUMN
7.	VII	Bidang pertambangan dan lingkungan hidup
8.	VIII	Bidang sosial, agama, dan pemberdayaan perempuan
9.	IX	Bidang kesehatan dan tenaga kerja
10.	X	Bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga
11.	XI	Bidang keuangan dan perbankan
12.	XII	Seputar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

c. **Presiden dan Wakil Presiden**

Wewenang dan kekuasaan presiden Republik Indonesia, dibagi dua jenis, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Negara meliputi hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. Jadi, mirip dengan kewenangan para kaisar dan ratu pada beberapa negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan.

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut, meliputi hal-hal berikut.

- 1) Melaksanakan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Mengadakan perdamaian dengan negara lain.
- 3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

- 4) Mengumumkan perang terhadap negara lain.
- 5) Mengangkat, melantik, dan memberhentikan dutaserta konsul untuk negara lain.
- 6) Menerima surat kepercayaan dari negara lain melaluiduta dan konsul negara lain.
- 7) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tandakehormatan tingkat nasional lainnya.
- 8) Menguasai angkatan laut, darat, udara dan kepolisian.

Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif, meliputi:

- 1) memimpin kabinet;
- 2) mengangkat dan melantik menteri-menteri;
- 3) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- 4) membentuk, mengubah, dan membubarkan kementeriannegara yang diatur dalam undang-undang.

Presiden RI juga mempunyai kekuasaan sebagai berikut.

- 1) Mengajukan rancangan undang-undang.
- 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 3) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan kanUndang-Undang.
- 4) Memberikan Grasi (pengurangan atau pengampunanhukuman). Grasi, yaitu hak untuk memberikanpengurangan hukum atau pengampunan danpembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contohyaitu mereka yang mendapat hukuman mati dikurangimenjadi hukuman seumur hidup.
- 5) Memberikan Abolisi (penghentian tuntutan pidana).Abolisi, yaitu hak untuk memberikan pernyataanbahwa hukuman tuntutan pidana harus digugurkanatau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harusdihentikan. Sebagai contoh mereka yang dijadikantersangka telah melakukan pemberontakan, dibatalkansebelum diadili.
- 6) Memberikan Amnesti (pembatalan hukuman).Amnesti, yaitu hak untuk memberikan pernyataanbahwa hukuman tuntutan pidana yang telah dijatuhkan,harus dibatalkan. Sebagai contoh, yaitu mereka yangpernah dituduh melakukan tindakan memberontakterhadap negara dibatalkan sesudah diadili.
- 7) Memberikan Rehabilitasi (pemulihan nama baikseseorang). Rehabilitasi, yaitu hak untuk memberikanpernyataan pengembali an nama baik seseorang. Sebagaicontoh, yaitu mereka yang pernah dihukum sehinggalanama baiknya tercemar. Akibat adanya kesalahandalam proses hukum, mereka kemudian direhabilitasinama baiknya melalui sebuah pernyataan.

Presiden RI sudah enam kali berganti sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu:

- 1) Ir. Soekarno (1945–1966);
- 2) Jend. TNI (Purn) Soeharto (1966–1998);
- 3) Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie (1998–1999);
- 4) K.H. Abdurrahman Wahid (1999–2001);
- 5) Megawati Soekarno Putri (2001–2004);
- 6) Jend. TNI (Purn.) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono,MA (2004–2009).

Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Baik presiden atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi, wakil presiden harus dapat bekerja sama dengan presiden. Secara umum tugas dan wewenang wakil presiden adalah sebagai berikut.

- 1) Membantu presiden dalam melakukan ke wajibannya.
- 2) Memperhatikan secara khusus, menampung masalahmasalah dan mengusahakan pemecahannya yangmenyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pembangunan.
- 4) Menggantikan presiden sampai habis waktunya jikapresiden berhalangan tetap.

Wakil Presiden RI sudah mengalami pergantian sebanyak sepuluh kali, yaitu:

- 1) Drs. Mohammad Hatta (1945–1956);
- 2) Sri Sultan Hamengkubowono IX (1973–1978);
- 3) Adam Malik (1978–1983);
- 4) Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah (1983–1988);
- 5) Letjen TNI (Purn.) Sudharmono, SH. (1988–1993);
- 6) Jend. TNI (Purn.) Try Sutrisno (1993–1998);
- 7) Prof. Dr. Ing B.J. Habibie (1998–1998);
- 8) Megawati Soekarno Putri (1999–2001);
- 9) Hamzah Haz (2001–2004);

10) Drs. Jusuf Kalla (2002–2009).

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan peserta dari pemilihan umum.

d. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di republik Indonesia yang merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA harus dapat terlepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki kekuasaan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Memutuskan permohonan kasasi berupa pembatalan terhadap putusan hakim yang dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.
- 2) Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili.
- 3) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ada empat fungsi pokok yang dijalankan Mahkamah Agung, yaitu fungsi pengadilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberian nasihat. Akibat kekuasaan kehakiman yang ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah kekuasaan yang bebas, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, maka kedudukan Mahkamah Agung dijamin oleh undang-undang.

Mahkamah Agung senantiasa harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum baik diminta atau tidak, kepada semua lembaga tinggi negara lainnya, terutama kepada presiden.

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Susunan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

- 1) Seorang ketua Mahkamah Agung.
- 2) Seorang wakil ketua Mahkamah Agung.
- 3) Beberapa orang ketua muda.
- 4) Hakim anggota, yaitu hakim agung.
- 5) Panitera dan panitera pengganti.

Ketua Mahkamah Agung juga dapat mengambil sumpah/janji Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang dilaksanakan Presiden. Secara umum fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dengan segala kewenangannya, sangat bebas dan tidak bergantung pada pihak lain. Keputusannya tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga tinggi lain.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi Negara Republik Indonesia yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, kekayaan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta daerah, anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan daerah yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang.

Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi baik pemerintah maupun swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Ada tiga fungsi pokok yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Fungsi operatif (melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan).
- 2) Fungsi rekomendasi (memberikan pertimbangan kepada pihak eksekutif dan legislatif).
- 3) Fungsi yudikatif (menyelenggarakan proses tuntutan perbendaharaan).

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Perbuatan yang merugikan keuangan negara khususnya persoalan pidana disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga Negara yang bebas dan mandiri, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23E ayat (1) bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang ketua merangkap anggota;
- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota;
- 3) Lima orang anggota.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Setelah reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki satu lagi lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, yaitu :

- 1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
- 2) untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
- 3) untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan UUD;
- 4) memutuskan pembubaran partai politik;
- 5) untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang di tetapkan oleh presiden berdasarkan pengajuan dan usulan dari MA, DPR, dan presiden yang masing-masing lembaga mengajukan usulan sebanyak tiga orang. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Hakim konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pejabat pada lembaga negara lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan Sembilan Hakim Konstitusi. Kesembilan hakim tersebut berasal dari tiga anggota diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), tiga anggota diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainnya diajukan oleh presiden.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa (hukum acara) dalam Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah

Konstitusi diatur dengan undang-undang.

g. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Adapun wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial, yaitu:

- 1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- 2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat

Terdapat lima hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut.

a. Politik Luar Negeri

Negara mengambil bagian dalam menentukan politik dan kebijakan luar negeri yang akan diambil untuk memenuhi kepentingan nasional dalam lingkup internasional.

b. Pertahanan Keamanan

Negara berperan aktif dalam pertahanan nasional dengan mengambil bagian atas seluruh tugas-tugas perlindungan negara dan warga negara terhadap serangan-serangan luar.

c. Yustisi (Peradilan)

Negara berupaya mencegah terjadinya konflik kepentingan antara individu dan kelompok.

d. Moneter (keuangan) dan Fiskal Nasional

Negara mengupayakan kebaikan bersama dan kesejahteraan umum.

e. Agama

Negara memberikan kesempatan mengembangkan dengan bebas hak beragama yang ada dalam kelompok secara terkendali.

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut, meliputi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- b. Menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain.
- c. Membuat perjanjian internasional.
- d. Menyatakan keadaan bahaya.

- e. Mengangkat duta atau konsul.
- f. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
- g. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanlainya.

Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan yang meliputi beberapa hal, di antaranya:

- a. memimpin kabinet;
- b. mengangkat dan melantik menteri-menteri;
- c. memberhentikan menteri-menteri;
- d. mengawasi operasional pembangunan;
- e. menerima mandat dari MPR-RI.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam UUD 1945.

Dengan adanya asas otonomi, maka daerah otonom memiliki hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, Pasal 1 bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai beberapa bantuan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan.

Tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah, termuat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 27, di antaranya sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesiatahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Latihan

1. Gubernur memimpin pemerintahan pusat di tingkat
 - a. kabupaten
 - b. provinsi
 - c. kota
 - d. daerah
2. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang adalah
 - a. presiden
 - b. DPR
 - c. MK
 - d. MA
3. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh
 - a. DPR
 - b. DPD
 - c. Menteri
 - d. hakim
4. Anggota DPRD berasal dari
 - a. rakyat
 - b. partai politik
 - c. warga
 - d. partai Islam
5. Peraturan Daerah (Perda) merupakan tugas dan wewenang
 - a. DPRD
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. presiden
6. Gubernur dipilih melalui
 - a. Pilkada
 - b. Pilgub
 - c. Pilkadaes
 - d. diangkat presiden
7. Pemimpin negara Indonesia disebut
 - a. raja
 - b. presiden
 - c. sultan
 - d. kaisar
8. Jabatan presiden berakhir setiap
 - a. 2 tahun
 - b. 4 tahun
 - c. 3 tahun
 - d. 5 tahun

9. Presiden ketiga negara Republik Indonesia adalah
 - a. Abdurrahman Wahid
 - b. Megawati Soekarno Putri
 - c. B.J. Habibie
 - d. Susilo Bambang Yudhoyono
10. Presiden dipilih oleh
 - a. MPR
 - b. Menteri
 - c. DPR
 - d. rakyat
11. Berikut ini adalah sistem pemerintahan Indonesia
 - a. Presidensial
 - b. Parlementer
 - c. Campuran
 - d. Kerajaan
12. Pemilihan umum diadakan dengan tujuan
 - a. melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
 - b. pesta hura-hura
 - c. memilih pemimpin yang sama
 - d. memilih penyalur aspirasi rakyat
13. Sistem pemilu dengan membagi wilayah negara dalam daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota perwakilan disebut
 - a. sistem mekanis
 - b. sistem organis
 - c. sistem distrik
 - d. sistem proporsional
14. Wakil presiden yang kedelapan ialah
 - a. B.J. Habibie
 - b. Megawati Soekarno Putri
 - c. Tri Sutrisno
 - d. Hamzah Haz
15. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh
 - a. DPR
 - b. Rakyat
 - c. MPR
 - d. presiden
16. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2004–2009 ialah ...
 - a. Prof. Ginanjar Kartasasmita
 - b. Drs. Agung Laksono
 - c. Ir. Akbar Tanjung
 - d. Dr. H. Hidayat Nur Wahid
17. Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009 ialah
 - a. Adiyaksa Dault
 - b. Wiranto
 - c. Jimly Assididqie
 - d. Nurdin Halid
18. Seorang menteri bertanggung jawab kepada
 - a. presiden
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. rakyat
19. Berikut ini merupakan lembaga yudikatif, yaitu
 - a. Presiden
 - b. DPR
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Menteri
20. Berikut merupakan urusan pemerintah pusat adalah
 - a. pemekaran wilayah
 - b. agama
 - c. APBD
 - d. kesenian

Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Kedudukan kepala negara yang tidak terpisahkan dari jabatan kepala pemerintah disebut
2. Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer, sistem kepemimpinannya dibedakan menjadi ... dan ...
3. Peserta Pemilu dapat bersifat dan
4. Pilkada diusulkan oleh partai yang memperoleh suara pemilu legislatif sebanyak ... % di daerah tersebut.
5. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, yaitu
6. Presiden RI sudah kali berganti sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
7. Hak untuk meminta keterangan dari eksekutif merupakan hak DPR yang disebut
8. Hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana harus digugurkan atau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan merupakan
9. Lembaga peradilan yang merupakan peradilan tertinggi adalah
10. Lembaga di Indonesia yang baru dibentuk setelah UUD 1945 diamandemen adalah

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Tuliskan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial.
2. Mengapa Indonesia memilih sistem presidensial sebagai sistem pemerintahannya?
3. Apakah tujuan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)?
4. Menurut pendapatmu apakah rakyat perlu dilibatkan dalam pemerintahan?
5. Sistem apakah yang dipakai dalam Pemilu di Indonesia?
6. Apakah manfaat yang diperoleh dengan adanya partai politik?
7. Lembaga apa saja yang terdapat di Indonesia setelah terjadinya amandemen?
8. Mengapa sebuah negara memerlukan pemerintahan?
9. Tuliskan minimal lima presiden yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia.
10. Masalah-masalah apakah yang dapat menghambat sistem pemerintahan di Indonesia?

Ujian Semester 1

1. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada
 - a. 15 Agustus 1945
 - b. 16 Agustus 1945
 - c. 17 Agustus 1945
 - d. 18 Agustus 1945
2. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibomatom oleh Sekutu pada
 - a. 6 dan 9 Agustus 1945
 - b. 6 dan 7 Agustus 1945
 - c. 6 dan 8 Agustus 1945
 - d. 6 dan 5 Agustus 1945
3. Pencipta lagu Indonesia Raya ialah
 - a. Gesang
 - b. WR. Soepratman
 - c. Sajuti Melik
 - d. Agus Salim
4. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman
 - a. berdiri Indonesia
 - b. kerajaan Hindia Belanda
 - c. kerajaan Pasundan
 - d. kerajaan Majapahit
5. Berikut bukan anggota Panitia Kecil yang terdiri atas 9 orang ialah
 - a. Bung Karno
 - b. Bung Hatta
 - c. Soepomo
 - d. Ahmad Subardjo
6. Ir. Soekarno mengusulkan lima rumus dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan
 - a. UUD 1945
 - b. Proklamasi
 - c. Pancasila
 - d. GBHN
7. Pro patria dan primus patrialis, yaitu
 - a. selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air
 - b. jiwa toleransi
 - c. jiwa solidaritas atau kesetiakawanan andari semua lapisan masyarakat
 - d. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
8. Asas-asas yang di terima sebagai nilai kebenaran yang ada dan perlu dilestarikan merupakan pengertian dari nilai
 - a. operasional
 - b. dasar
 - c. global
 - d. regional
9. Nasionalisme, patriotisme, jiwa dan semangat merdeka merupakan sebagian dari nilai
 - a. dasar
 - b. global
 - c. operasional
 - d. regional
10. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum artinya merupakan
 - a. dasar hukum bagi terselenggaranya ketertiban
 - b. sumber dari segala sumber hukum
 - c. satu-satunya alat untuk mencapai ketertiban umum
 - d. landasan bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
11. Presiden memiliki hak untuk memberikan pengurangan atau pengampunan dan pembebasan hukuman, dikenal dengan sebutan
 - a. rehabilitasi
 - b. grasi
 - c. amnesty
 - d. abolisi
12. Pemilihan umum dilakukan setiap
 - a. 3 tahun sekali
 - b. 4 tahun sekali
 - c. 5 tahun sekali
 - d. 6 tahun sekali
13. Berikut yang bukan termasuk system Pemilu di Indonesia
 - a. mekanis
 - b. distrik
 - c. proporsional
 - d. afektif
14. Sistem Pilkada yang dianut oleh Negara Indonesia ialah
 - a. langsung
 - b. perantara
 - c. tidak langsung
 - d. lewat DPR
15. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal merupakan tujuan dari diadakannya pilkada secara
 - a. langsung
 - b. perantara
 - c. tidak langsung
 - d. lewat DPR
16. Pasangan yang diusulkan partai politik memenuhi ketentuan perolehan suara berkisar ... di daerah.
 - a. 15%
 - b. 20%
 - c. 25%
 - d. 30%
17. Undang-undang yang mengatur tentang persyaratan dan tahapan Pilkada adalah
 - a. UU No. 32 tahun 2004
 - b. UU No. 34 Tahun 2004
 - c. UUD 1945
 - d. TAP MPR
18. Komisi I DPR membahas tentang bidang ...
 - a. pertanian
 - b. transportasi
 - c. pertahanan dan keamanan
 - d. hukum dan luar negeri

19. Kekuasaan Presiden RI di bidang legislatif adalah
- membuat UU
 - memberikan grasi
 - memberikan abolisi
 - memberikan amnesti
20. Hak untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik seseorang disebut dengan
- grasi
 - rehabilitasi
 - abolisi
 - amnesti

Isilah titik-titik berikut dengan benar.

- Teks proklamasi diketik oleh
- Istilah Pancasila dapat ditemukan dalam kitab karya
- Dokuritsu Junbi Cosakai adalah
- Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari
- Piagam Jakarta sebenarnya merupakan
- Rakyat, pemerintah, dan pemerintahan adalah
- Kampanye politik dilakukan untuk
- Parlemen merupakan
- Eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah
- Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan selama

Jawablah pertanyaan berikut.

- Bagaimana proses perumusan Pancasila itu terjadi?
- Manfaat apa yang diperoleh dengan meneladani nilai-nilai kebersamaan dan perjuangan?
- Nilai-nilai juang apa saja yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila?
- Berikan contoh cara menjalankan hak sebagai warga negara yang baik.
- Mengapa pemilu diselenggarakan secara bertahap?
- Bagaimana kedudukan rakyat dalam sistem pemerintahan?
- Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kepala daerah?
- Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah?
- Bagaimana peranan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia?
- Menurut pendapatmu, apakah lembaga-lembaga negara di Indonesia sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Berikan alasanmu.

Semester 2

Peranan Indonesia di Asia Tenggara

Kerja Sama Negara-Negara Asia Tenggara Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Indonesia selalu berperan aktif dalam berbagai kerja sama internasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara adalah Association of South East Asian Nations (ASEAN). ASEAN merupakan kumpulan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dasar perwujudan ASEAN ini adalah persamaan latar belakang budaya, persamaan nasib sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hal tersebut akhirnya menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Peran Serta Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

1. Sejarah ASEAN

Sejarah pembentukan ASEAN didasarkan pada ekonomi, sosial, budaya, faktor internal (dari dalam) dan eksternal (dari luar). Faktor internal, yaitu bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas jajahan negara Barat. Adapun faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam (Indo-Cina) dan sikap Republik Rakyat Cina (RRC) yang ingin mendominasi Asia Tenggara.

Beberapa Menteri Luar Negeri Asia Tenggara merasa terpanggil untuk membentuk suatu badan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menteri-menteri tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Adam Malik (Indonesia)
- b. Rajaratnam (Singapura)
- c. Narcisco Ramos (Filipina)
- d. Tun Abdul Rajak (Malaysia)
- e. Tanat Khoman (Tailand)

Pada awal berdirinya, ASEAN terdiri atas lima negara anggota. Namun, sekarang ASEAN terdiri atas sepuluh negara anggota. Brunei bergabung menjadi negara anggota ASEAN yang ke-6 pada 7 Januari 1984, kemudian Vietnam menjadi negara anggota ASEAN yang ke-7 pada 28 Juli 1995, selanjutnya Laos dan Myanmar bergabung menjadi negara anggota ASEAN yang ke-8 dan ke-9 pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja bergabung sebagai negara ASEAN yang ke-10 pada 16 Desember 1998.

2. Asas ASEAN

ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste.

3. Dasar ASEAN

Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.

- a. Saling menghormati terhadap kemerdekaan, wilayahkedaulatan negara, dan identitas semua bangsa.
- b. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupannasional yang bebas dari halangan luar.
- c. Tidak saling turut campur urusan dalam negerimasing-masing.
- d. Penyelesaian pertengkaran dan persengketaan secaraadamai.
- e. Tidak mempergunakan ancaman/penggunaankekuatan.
- f. Menjalankan kerja sama secara aktif.

4. Tujuan ASEAN

Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut.

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial,dan pengembangan kebudayaan di kawasan AsiaTenggara.
- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regionaldengan jalan menghormati keadilan dan tertibhukum.
- c. Meningkatkan pertanian, industri, perdagangan, jasadn meningkatkan taraf hidup.
- d. Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidangekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan,dan administrasi.
- e. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saranasarana latihan dan penelitian.
- f. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaatdengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

5. Struktur ASEAN

a. Sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Pertama di Bali 1976 Untuk memperlancar tugas dan tujuan ASEAN, dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut.

- 1) ASEAN Ministerial Meeting (Sidang Tahunan para Menteri).
- 2) Standing Committee (Badan yang bersidang di antaradua sidang menteri luar negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri).
- 3) Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.
- 4) Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kotanegara-negara anggota ASEAN.

b. Setelah KTT Bali 1976

Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada Agustus 1977, peserta KTT telah menyepakati dan mengesahkan struktur organisasi ASEAN sebagai berikut.

- 1) Summit Meeting (Pertemuan kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas/kekuasaan tertinggi didalam ASEAN.
- 2) ASEAN Ministerial Meeting (Sidang Tahunan para Menteri).
- 3) Sidang para menteri ekonomi, yang diselenggarakan setahun dua kali.
- 4) Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi).
- 5) Standing Committee.
- 6) Komite-komite.

Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para menlu ASEAN secara bergilir. Sekretariat Jenderal ASEAN mempunyai masa jabatan dua tahun. Dibantu oleh staf regional dan staf lokal.

Tujuan yang ingin dicapai dari peningkatan kerja sama tersebut, yaitu semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional khususnya kawasan Asia Tenggara. Indonesia perlu membangun suatu arah kebijakan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama Asia Tenggara adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.
- 2) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan penyatuan regional khususnya di ASEAN.
- 3) Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerja sama internasional bilateral (kerja sama dua negara) dan multilateral (kerja sama banyak negara) maupun kerja sama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.

Atas dasar prinsip itulah, ASEAN berkembang pesat sampai sekarang dengan bertambahnya anggota menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

ASEAN diharapkan terus tumbuh dan berkembang menjadi sarana dalam menyejahterakan seluruh negara yang menjadi anggotanya. Harapan ini sesuai dengan prinsip dasar ASEAN, yaitu sebagai berikut.

- 1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, dan identitas nasional semua negara.
- 2) Hak bagi setiap negara untuk terbebas dari campurtangan pihak luar.
- 3) Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
- 4) Penyelesaian perbedaan dan persengketaan dengan cara damai.
- 5) Menolak penggunaan ancaman dan paksaan.
- 6) Kerja sama yang efektif dengan sesama anggota.

Sebelum ASEAN terbentuk, sudah ada beberapa organisasi Asia Tenggara, seperti berikut ini.

- 1) ASA (Association of South East Asia) dengan anggota Malaysia, Filipina, Muangthai yang didirikan di Bangkok pada 31 Juli 1961.
- 2) ASPAC (Asia Pacific Cooperation), yaitu kerja sama Asia Pasifik yang beranggotakan Filipina, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru.
- 3) SEATO (South East Asia Treaty Organization), yaitu organisasi pertahanan Asia Tenggara atau persekutuan militer negara Asia Tenggara, terdiri atas Thailand, dan Filipina yang didukung oleh Malaysia dan Vietnam.
- 4) Maphilindo, yaitu organisasi berdasarkan konsep negara-negara serumpun. Anggotanya, di

antaranya Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Dasar ideal kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah sejiwa dengan Pancasila. Kerja sama yang dimaksud adalah membangun komunikasi antarnegara dengan membentuk suatu perjanjian yang saling menguntungkan antara negara yang mengadakan perjanjian.

Kerja sama yang dipakai oleh bangsa Indonesia adalah semangat kebersamaan dan saling menguntungkan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berusaha melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam melakukan kerja sama internasional.

Berikut adalah beberapa contoh hasil kerja sama antarnegara anggota ASEAN.

- 1) Pabrik pupuk urea di Malaysia.
- 2) Pabrik abu soda di Thailand.
- 3) Pabrik tembaga di Filipina.
- 4) Pabrik pupuk urea di Aceh.
- 5) Pabrik diesel dan pabrik vaksin di Singapura.

Di samping itu, ada pula beberapa contoh kerja sama lain antara Indonesia dengan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam bidang hukum dan keamanan, diadakan perjanjian ekstradisi (penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain).
- 2) Dalam bidang olahraga, diadakan pertandingan olahraga Asia Tenggara, yaitu SEA Games setiap dua tahun sekali dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai penyelenggaranya secara bergantian.
- 3) Dalam bidang kesehatan, bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dan berbagai wabah penyakit berbahaya misalnya flu burung.
- 4) Dalam bidang pariwisata, diadakan kunjungan antarnegara untuk memperkenalkan dan memajukan potensi pariwisata yang ada di setiap negara.
- 5) Dalam bidang kesenian, diadakan pagelaran seni budaya antarnegara untuk saling mengenal atau bahkan mempelajari seni budaya yang dimiliki oleh negara lain.
- 6) Dalam bidang pendidikan, diadakan pertukaran pelajaran mahasiswa antarnegara anggota ASEAN untuk memajukan kualitas pendidikan.

Latihan

1. Melaksanakan ketertiban dunia dan negara merupakan tanggung jawab
 - a. bangsa
 - b. warga Negara
 - c. pemerintah
 - d. DPR
2. Keberhasilan negara Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa penyelenggara Konferensi Asia-Afrika, membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia
 - a. diacuhkan oleh dunia
 - b. mengarah pada satu blok
 - c. dilecehkan oleh dunia
 - d. mendapat perhatian dunia
3. Rajaratnam merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang berasal dari negara
 - a. Indonesia
 - b. Malaysia
 - c. Thailand
 - d. Singapura
4. ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara
 - a. Asia Tenggara
 - b. Asia Timur
 - c. Asia Selatan
 - d. Asia Barat daya
5. Faktor eksternal pembentukan ASEAN karena terjadi perang di negara
 - a. Cina
 - b. Thailand
 - c. Vietnam
 - d. Malaysia
6. Berikut ini adalah salah satu asas yang dianut oleh ASEAN
 - a. asas keanggotaan tertutup
 - b. asas keanggotaan terbuka
 - c. asas keanggotaan tetap
 - d. asas keanggotaan tidak tetap
7. Sekretariat ASEAN yang diketuai oleh orang sekretaris jenderal, berkedudukan di
 - a. Manila
 - b. Malaysia
 - c. Singapura
 - d. Jakarta
8. South East Asian Treaty Organization (SEATO) merupakan organisasi
 - a. pertahanan
 - b. makanan
 - c. pendidikan
 - d. transportasi

9. Organisasi ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Kota
 - a. Jakarta
 - b. Kuala Lumpur
 - c. Bangkok
 - d. Manila
11. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional merupakan salah satu isidari
 - a. struktur ASEAN
 - b. keanggotaan ASEAN
 - c. dasar ASEAN
 - d. tujuan ASEAN
13. Organisasi ASEAN dipimpin oleh seorang
 - a. presiden
 - b. menteri
 - c. sekretariat Jenderal
 - d. sekretariat Nasional
15. Deklarasi ASEAN diprakarsai oleh 5 negara kecuali
 - a. Indonesia
 - b. Singapura
 - c. Pakistan
 - d. Filipina
17. Organisasi Asia Tenggara yang bergerak di bidang militer adalah
 - a. ASA
 - b. ASPAC
 - c. SEATO
 - d. Maphilindo
19. Perwakilan Malaysia yang membentuk kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara
 - a. Adam Malik
 - b. Rajaratnam
 - c. Adul Rajak
 - d. Khotman
10. Organisasi berdasarkan konsepsi negaranegara serumpun dikenal dengan
 - a. Maphilindo
 - b. ASA
 - c. ASPAC
 - d. SEATO
12. Sidang para menteri ekonomi berlangsung dalam
 - a. setahun dua kali
 - b. setahun tiga kali
 - c. setahun empat kali
 - d. setahun lima kali
14. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus pada tahun...
 - a. 1955
 - b. 1970
 - c. 1965
 - d. 1967
16. Organisasi Asia Tenggara yang didirikan pada 31 Juli 1961 adalah
 - a. ASA
 - b. ASPAC
 - c. SEATO
 - d. Maphilindo
18. Perwakilan Indonesia yang membentuk kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara ialah
 - a. Adam Malik
 - b. Rajaratnam
 - c. Adul Rajak
 - d. Khotman
20. Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok pada
 - a. 18 Agustus 1945
 - b. 11 November 1947
 - c. 8 Agustus 1961
 - d. 8 Agustus 1967

Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. ASEAN singkatan dari
2. ASEAN berdiri pada tahun ... di
3. ASEAN anggotanya dari kawasan
4. Narciso Ramos merupakan perwakilan dari negara
5. Saling menghormati terhadap kemerdekaan merupakan prinsip dari
6. Keanggotaan terbuka merupakan ... ASEAN
7. KTT pertama ASEAN diselenggarakan di
8. KTT kedua diselenggarakan di
9. Tahun berapa KTT pertama dan kedua diselenggarakan
10. Standing Committee adalah

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Mengapa perdamaian sangat penting bagi dunia?
2. Kemukakan sejarah berdirinya ASEAN
3. Apa yang menjadi asas ASEAN?
4. Apa yang melatarbelakangi pembentukan ASEAN?
5. Tuliskan tujuan dibentuknya ASEAN.
6. Uraikan hasil dari KTT ASEAN pertama.
7. Tuliskan hasil dari KTT ASEAN kedua.
8. Manfaat apa yang diperoleh dari keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN?
9. Tuliskan beberapa organisasi yang ada di Asia Tenggara sebelum ASEAN terbentuk.
10. Kegiatan pokok apa yang dilakukan oleh ASEAN?

Politik Luar Negeri Indonesiada dalam Era Globalisasi

A. Politik Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan ciri khas yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah pemikiran besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia.

Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri diabdikan bagi kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi atau cara yang diterapkan bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (dana dan sumber daya) yang dimiliki. Dengan demikian kebijakan luar negeri akan bergantung pada politik luar negeri. Bebas dan aktif dalam politik luar negeri dapat diartikan bebas dalam memilih apapun dan aktif dalam berpartisipasi dalam perdamaian dunia.

1. Dasar Pertimbangan

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya semua warga tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif agar tidak hanyut dalam arus pertentangan bebas.

2. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri bebas aktif tetap berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 2004–2009. RPJM di antaranya sebagai berikut.

- Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
- Menitikberatkan pada solidaritas antarnegaraberkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa.
- Menolak penjajahan dalam segala bentuk.
- Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja samainternasional bagi kesejahteraan rakyat.

Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

- Landasan ideal
Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Landasan Konstitusional/UUD 1945

Pembukaan, alinea pertama "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan..." dan pembukaan alinea keempat "... ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Batang tubuh UUD 1945, pasal 11 ayat 1 "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".

- Landasan Operasional

Peraturan perundang-undangan, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

B. Tujuan dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif secara umum memiliki beberapa kebijakan. Adapun kebijakan politik yang diambil, di antaranya yaitu:

- pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;
- pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;
- pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, serta stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya perpecahan bangsa;
- peningkatan hubungan bilateral dengan memprioritaskan negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, penanaman modal dan pariwisata;
- memajukan kerja sama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia;
- pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat dilihat dari hal berikut.

- Dalam lingkup nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri. Politik luar negeri Indonesia juga perlu terus diabdikan untuk menunjang kesejahteraan umum dan pemulihan ekonomi nasional.

2. Dalam lingkup hubungan antardua negara, Indonesia berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga akan terus mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan negara-negara yang secara geografis berbatasan langsung, namun tentunya dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejajeraan dan saling menghormati.
3. Dalam lingkup wilayah, Indonesia sangat mendukung pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan akan berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah ASEAN dan tetap memainkan kepemimpinan di ASEAN serta menjaga kekompakan sesama ASEAN. Dalam 40 tahun terakhir, Indonesia telah memainkan peranan penting dalam membangun ASEAN dan membina kawasan.
4. Dalam lingkup dunia, Indonesia tetap menaruh harapan besar pada PBB dan tetap meyakini keabsahan institusi ini. PBB adalah satu-satunya lembaga internasional yang paling mampu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat mendunia, dengan catatan terus dilaksanakannya program-program PBB hingga tercapainya suatu keadaan yang benar-benar dapat menampung harapan seluruh negara anggotanya.

C. Peranan Indonesia dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara Indonesia harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

1. Bebas, artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara pandangan atau pemikiran bertentangan.
2. Aktif, artinya Indonesia dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dapat dilihat pada contoh berikut.

1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.
2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur.
3. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
4. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antarpemerintah Filipina dan bangsa Moro, serta turut berpartisipasi dalam meredakan konflik di Lebanon.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian internasional telah menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peranan yang strategis dalam dunia internasional. Kondisi ini semakin dipertegas lagi dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang merupakan lembaga internasional di bawah naungan PBB yang bergerak dalam masalah perdamaian internasional.

Peranan penting Indonesia saat ini harus dapat dilanjutkan oleh seluruh generasi penerus bangsa, oleh karena itu masa depan dan kemajuan bangsa terletak di pundak generasi penerusnya.

Latihan

1. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri Indonesia menggunakan program yang lebih dikenal sebagai
 - a. politik bebas bebas
 - b. politik aktif aktif
 - c. politik bebas aktif
 - d. politik Indonesia
2. Gambar di atas adalah logo organisasi internasional, yaitu



Sumber: www.kabinct.go.id

- a. ASEAN
- b. APEC
- c. ASEAN
- d. PBB

3. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri Indonesia selalu menjalinkerja sama yang melahirkan suatu ikatanyaitu
 - a. perjanjian
 - b. musyawarah
 - c. kerja sama
 - d. politik
5. Pemikiran besar yang dianut oleh suatu negara tentang cara pandang Negara terhadap dunia merupakan pengertian dari
 - a. kebijakan luar negeri
 - b. Departemen Luar Negeri
 - c. politik luar negeri
 - d. kerja sama luar negeri
7. Politik luar negeri adalah
 - a. wawasan internasional
 - b. wawasan rakyat
 - c. wawasan daerah
 - d. wawasan nasional
9. Gambar berikut ialah menteri luar negeri yang mewakili Indonesia dalam pembentukan ASEAN

Sumber : www.sehatpri.go.id

 - a. Hasan Wirajuda
 - b. Adam Malik
 - c. Ali Alatas
 - d. Mochtar Kusumaatmadja
11. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri bebas dan aktif, ada beberapa sikap yang perlu didukung, kecuali
 - a. memantapkan peranan Indonesia dalam ASEAN
 - b. menyokong uji coba nuklir di bawah dasar laut
 - c. mendukung netralisasi ASEAN dan Samudra Indonesia
 - d. memperkokoh kerja sama negara-negara Non-Blok
13. Pemulihan perekonomian Asia Tenggara merupakan salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konteks
 - a. nasional
 - b. bilateral
 - c. regional
 - d. global
15. Jika terjadi konflik di organisasi ASEAN, sebaiknya diselesaikan dengan cara
 - a. kekerasan
 - b. hukuman
 - c. damai
 - d. peperangan
4. Identitas yang membedakan negara satu dengan yang lainnya dilihat dari
 - a. budaya
 - b. politik luar negeri
 - c. kerja sama
 - d. keaktifan
6. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia ialah
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. GBHN
 - d. TAP MPR
8. Pada tahun pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua kekuatan besar dunia yakni negara
 - a. Cina dan Uni Soviet
 - b. Indonesia dan Malaysia
 - c. Amerika Serikat dan Jepang
 - d. Amerika Serikat dan Uni Soviet
10. Salah satu segi yang senantiasa harus diperhatikan untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan untuk
 - a. kepentingan nasional
 - b. kepentingan regional
 - c. kepentingan internasional
 - d. perdamaian bangsa
12. Berikut ini merupakan salah satu kebijakan politik dan hubungan luar negeri
 - a. peningkatan hubungan bilateral
 - b. peningkatan disintegrasi
 - c. meningkatkan keyakinan
 - d. peningkatan pembangunan spiritual
14. Meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konteks
 - a. nasional
 - b. bilateral
 - c. regional
 - d. global
16. Pada 24 April 1955, gedung merdeka merupakan gedung pertemuan yang pernah dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan
 - a. KTT Asia Afrika
 - b. KTT APEC
 - c. KTT ASEM
 - d. KTT ASEAN

17. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah
 - a. KEPPRES
 - b. peraturan Menlu
 - c. Pancasila
 - d. UUD 1945
18. Pedoman operasional dalam melaksanakan kegiatan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah
 - a. Pembukaan UUD 1945
 - b. Penjelasan UUD 1945
 - c. TAP MPRS No. IX/ MPRS/1966
 - d. TAP MPRS No. XII/ MPRS/1966
19. Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri sesuai dengan UUYakni
 - a. UU No. 35 Tahun 1999
 - b. UU No. 36 Tahun 1999
 - c. UU No. 37 Tahun 1999
 - d. UU No. 38 Tahun 1999
20. Dalam upaya menjalin hubungan atau kerja sama dengan negara lain Indonesia melakukannya dengan
 - a. kebijakan dan strategi politik luar negeri
 - b. strategi dan kemampuan politik luar negeri
 - c. kebijakan pemerintah
 - d. kerja sama luar negeri

Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Dalam menjalankan hubungan dengan luar negeri, Indonesia melakukannya dengan politik
2. Kebijakan luar negeri ialah
3. Politik luar negeri Indonesia dibangun pada konteks
4. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah
5. Politik luar negeri ialah
6. Dasar politik luar negeri Indonesia berdasarkan ... dan
7. Pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional merupakan salah satu ... dalam hubungan luar negeri Indonesia.
8. Organisasi yang menjadi tujuan Indonesia dalam konteks global ialah
9. KTT ASEM 2004 dihadiri oleh
10. Politik luar negeri yang bebas dan aktif ialah

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif?
2. Apa yang menjadi tujuan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif?
3. Uraikan oleh kamu mengenai arti bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia.
4. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif?
5. Apa yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia?
6. Sebutkan tujuan politik luar negeri dalam konteks nasional, bilateral, regional, dan global.
7. Sebutkan perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
8. Apa yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri?
9. Sebutkan contoh lain perwujudan atau pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
10. Menurut kamu pengaruh apa yang dihasilkan dari politik luar negeri Indonesia terhadap pembangunan nasional?

Ujian Semester 2

1. Negara mengadakan kerja sama untuk meningkatkan
 - a. kepentingan nasionalnya
 - b. kesejahteraan Negara
 - c. politik luar negeri
 - d. hubungan internasional
2. Dasar perwujudan ASEAN adalah
 - a. persamaan nasib sebagai Negara yang pernah dijajah
 - b. mempunyai perekonomian yang sama
 - c. dalam satu kawasan, yaitu Asia Tenggara
 - d. membentuk pertahanan militer regional
3. Berikut ini bukan merupakan Menteri Luar Negeri yang membentuk suatu badan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yaitu
 - a. Rajaratman
 - b. Hasan Wirayuda
 - c. Tanat Khoman
 - d. Narcisco Ramos
4. Melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab
 - a. individu
 - b. semua Negara
 - c. negara bagian
 - d. negara serikat
5. Sekretariat ASEAN yang dikepalai seorang Sekretaris Jenderal, berkedudukan di negara
 - a. Manila
 - b. Malaysia
 - c. Singapura
 - d. Indonesia
6. SEATO merupakan organisasi
 - a. pertahanan
 - b. makanan
 - c. pendidikan
 - d. transportasi
7. Pada 1955 Indonesia menyelenggarakan konferensi yang dinamakan
 - a. Konferensi Non-Blok
 - b. Konferensi Timur Tengah
 - c. Konferensi Asia-Eropa
 - d. Konferensi Asia Afrika
8. Organisasi Asia Tenggara yang bergerak berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun
 - a. ASA
 - b. ASPAC
 - c. SEATO
 - d. Maphilindo
9. Dalam struktur organisasi ASEAN terdapat sidang tahunan para menteri yang disebut
 - a. summit meeting
 - b. asia europe meeting
 - c. standing committee
 - d. committee
10. Tujuan organisasi ASEAN adalah
 - a. mengembangkan kepercayaan
 - b. mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan nasional yang bebas dari halangan dari luar
 - c. penyelesaian pertengkaran dan persengketaan secara damai
 - d. meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
11. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri Indonesia menggunakan program yang lebih dikenal sebagai
 - a. politik bebas bebas
 - b. politik aktif aktif
 - c. politik bebas aktif
 - d. politik Indonesia
12. Identitas yang membedakan negara satu dengan yang lainnya dilihat dari
 - a. budaya
 - b. politik luar negeri
 - c. kerja sama
 - d. keaktifan
13. Pelaksanaan politik luar negeri dibawah suatu kementerian atau menteri yakni
 - a. Menteri Dalam Negeri
 - b. Menteri Luar Negeri
 - c. Menteri Pariwisata
 - d. Menteri Luar daerah
14. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia ialah
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. undang-undang
 - d. TAP MPR
15. KTT yang tidak dihadiri oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono setelah menjadi presiden tahun 2004 adalah
 - a. KTT APEC
 - b. KTT NATO
 - c. KTT Asia Afrika
 - d. KTT ASEAN
16. Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan luar negeri yaitu
 - a. UU No. 22 Tahun 1999
 - b. UU No. 37 Tahun 1999
 - c. UU No. 22 Tahun 2000
 - d. UU No. 37 Tahun 2000

17. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah
- KEPRES
 - peraturan Menlu
 - Pancasila
 - UUD 1945
18. Sifat dari politik luar negeri cenderung
- diam
 - tetap
 - bergerak
 - aktif
19. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri yang bebas dan aktif, adabeberapa sikap yang perlu didukung, kecuali
- memantapkan peranan Indonesia dalam ASEAN
 - menyokong uji coba nuklir di bawah dasar laut
 - mendukung netralisasi ASEAN dan Samudera Indonesia
 - memperkokoh kerja sama negaranegara Non-Blok
20. Berikut ini merupakan salah satu kebijakan politik dan hubungan luar negeri
- peningkatan hubungan bilateral
 - peningkatan disintegrasi
 - peningkatan pembangunan spiritual
 - peningkatan keyakinan

Isilah titik-titik berikut dengan benar.

- Globalisasi adalah
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 berisi tentang
- Politik luar negeri bebas aktif berdasarkan pada
- Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain
- Tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia antara lain
- Presiden RI yang terpilih untuk periode 2004–2009 ialah
- Menteri luar negeri Indonesia periode 2004–2009 ialah
- Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif lahir karena
- Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain....
- Politik luar negeri cenderung bersifat

Jawablah pertanyaan berikut.

- Apakah yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif?
- Mengapa Indonesia memilih politik luar negeri yang bebas dan aktif?
- Apakah yang melatarbelakangi lahirnya politik luar negeri yang bebas dan aktif?
- Apakah yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri?
- Apakah yang menjadi landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia?
- Menurutmu apakah Indonesia perlu membina hubungan dengan negara lain?
- Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain saat ini?
- Tuliskan kaitan antara kebijakan luar negeri dengan politik luar negeri.
- Menurutmu apakah Indonesia perlu memiliki peranan dalam dunia internasional?
- Tuliskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah terpilih sebagai presiden.